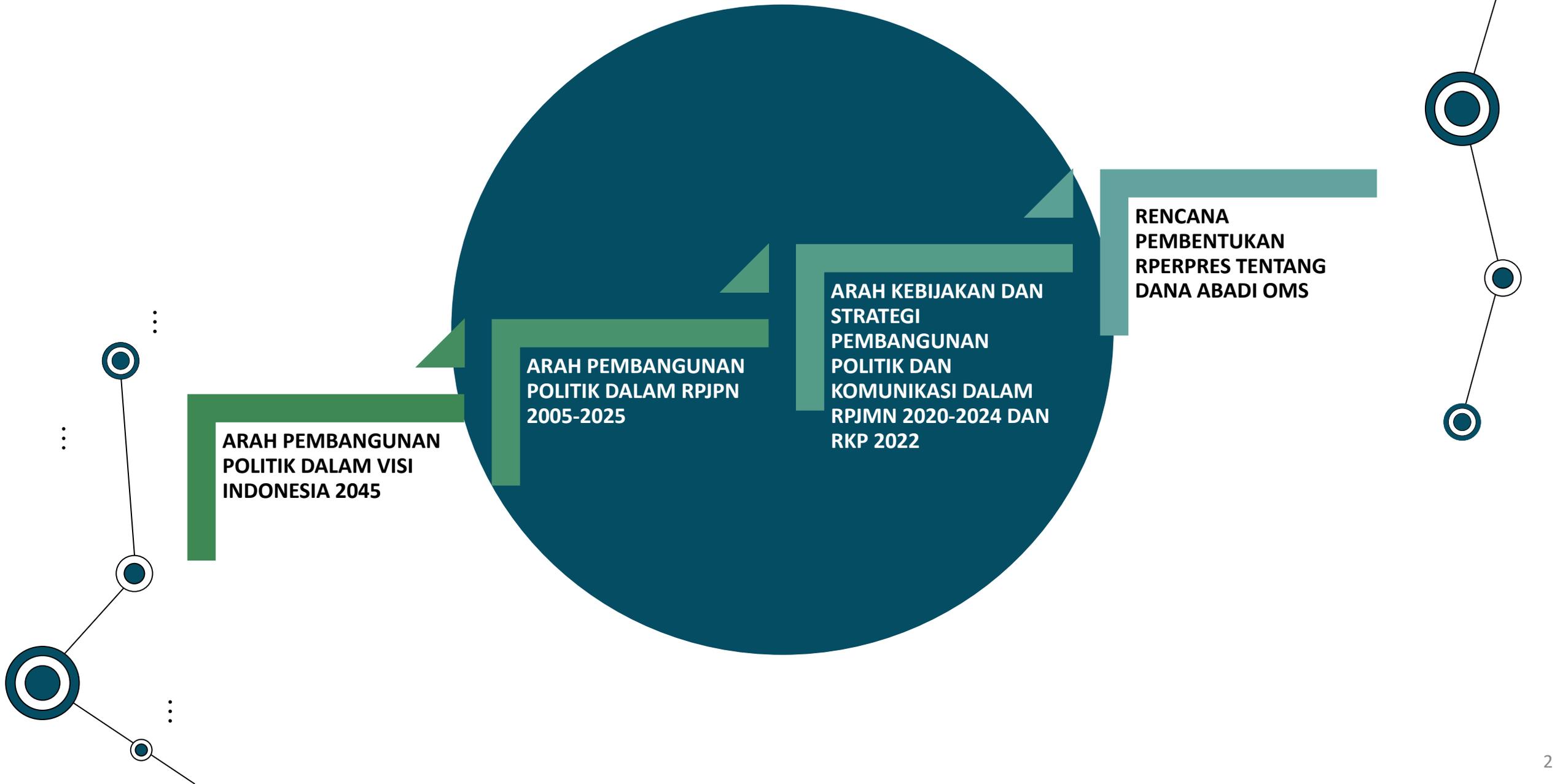


PELUANG PENDANAN APBN BAGI NGO

Disampaikan pada Lokakarya dengan tema “Mendorong Tersedianya Lingkungan Pendukung Sumber Daya Domestik bagi NGO”

Wariki Sutikno
Plt. Direktur Politik dan Komunikasi

KERANGKA PAPARAN

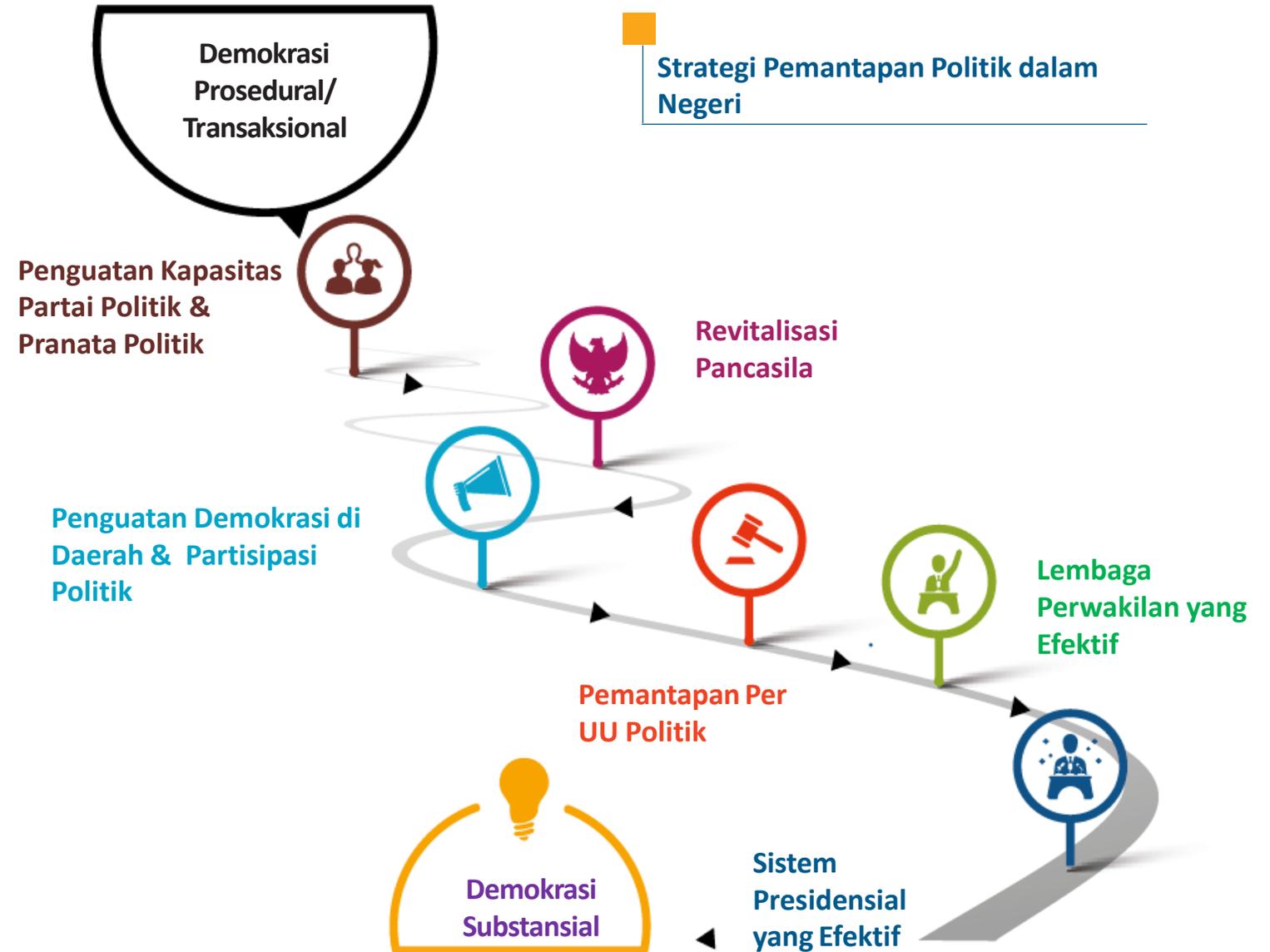




**ARAH
PEMBANGUNAN
POLITIK DALAM VISI
INDONESIA 2045**

POLITIK DALAM NEGERI

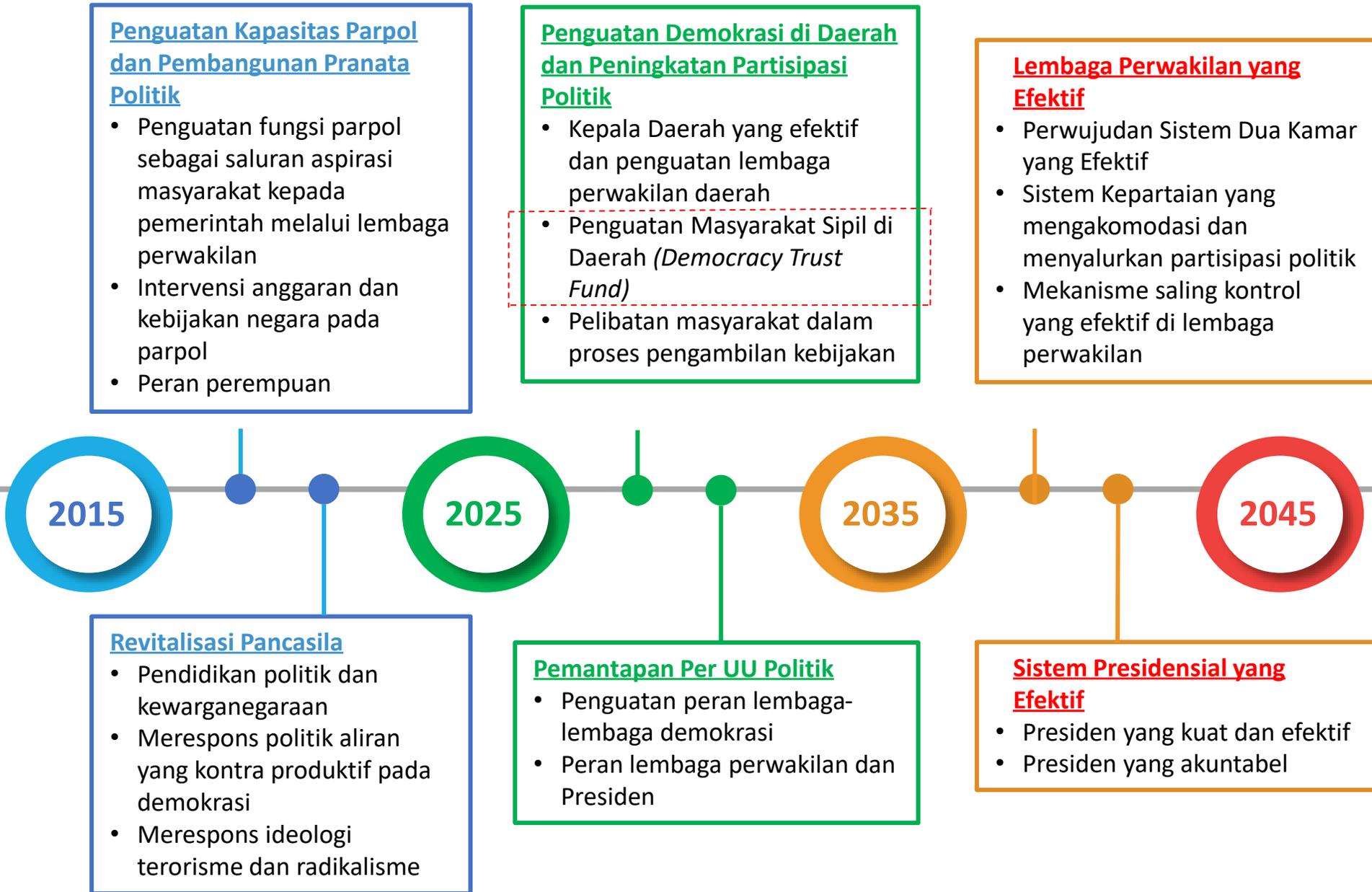
Kualitas demokrasi Indonesia terus ditingkatkan menuju **demokrasi substansial**, yaitu demokrasi yang mengemban amanat rakyat.



POLITIK DALAM NEGERI: TAHAPAN PENCAPAIAN SASARAN 2045

DEMOKRASI PROSEDURAL -
TRANSAKSIONAL

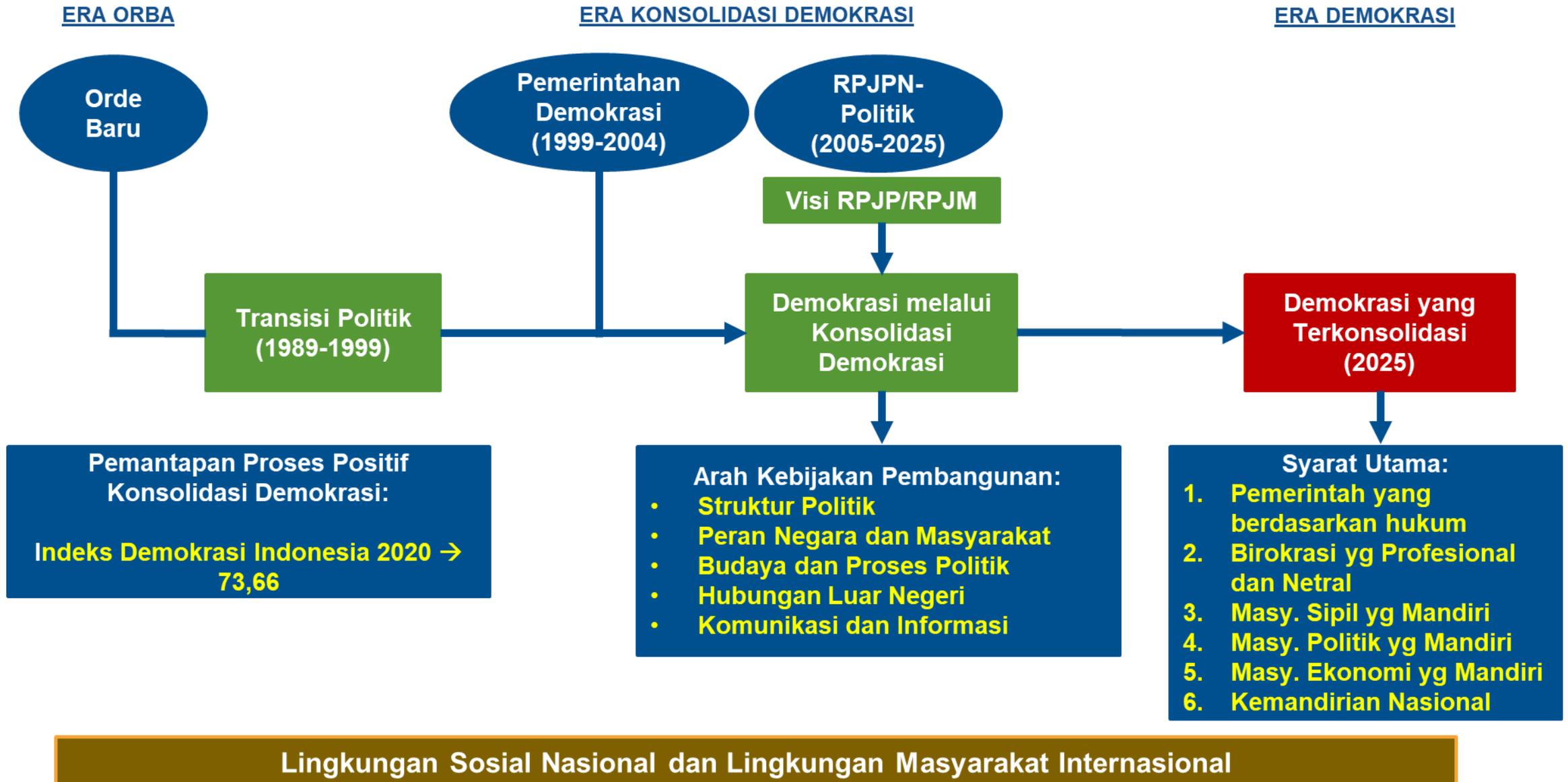
DEMOKRASI
SUBSTANSIAL





ARAH PEMBANGUNAN POLITIK DALAM RPJPN 2005-2025

VISI PEMBANGUNAN POLITIK 2005-2045





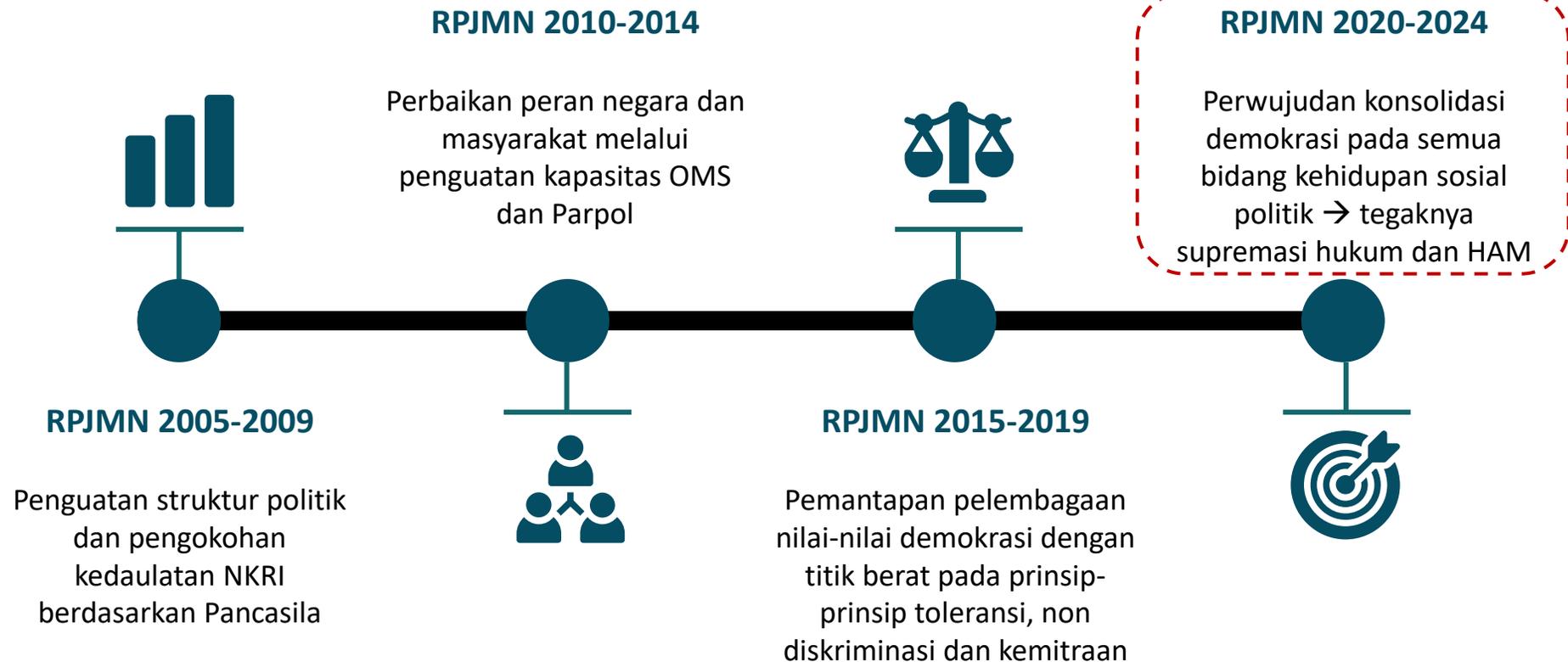
**ARAH
PEMBANGUNAN
POLITIK DALAM
RPJMN 2020-2024
DAN RKP 2022**

VISI PEMBANGUNAN POLITIK 2020-2024

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum:

Memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat

(UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025)



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi

1. Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik
2. Pemantapan Demokrasi Internal Parpol
3. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Parpol
4. Penguatan Penyelenggara Pemilu



Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan

1. Pendidikan Politik dan Pemilihan secara konsisten
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil
3. Penyelenggaraan Kepemiluan yang Baik



Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik

1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D, serta penyediaan akses dan konten
2. Peningkatan literasi TIK masyarakat
3. Penguatan Peran dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran, dan Jurnalis

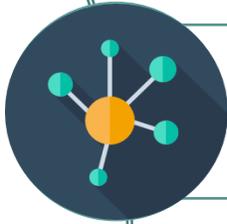


RENCANA PENDANAAN OMS (DANA ABADI)

MENGAPA OMS PERLU MENDAPAT PENDANAAN PUBLIK?



OMS dibutuhkan sebagai mitra Pemerintah yang secara konstruktif mempengaruhi proses perumusan kebijakan.



OMS menjadi *counterbalance* dari institusi demokrasi yang menjaga keseimbangan ekosistem demokrasi (Laine: 2014), (Marta: 2017).



OMS menjadi saluran aspirasi alternatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan.



Pendanaan publik dapat menjaga keberlanjutan program dan kegiatan dari OMS, mengurangi ketergantungan terhadap donor, dan meningkatkan kemandirian.

PERMASALAHAN KEUANGAN OMS

Pendanaan dari lembaga donor internasional mulai menurun. Hal ini akibat dari status Indonesia yang dinyatakan sebagai Negara Berpendapatan Menengah Bawah pada tahun 2006, serta pandangan bahwa Indonesia telah berhasil mengkonsolidasikan demokrasi dan kestabilan politik.

Hubungan antara OMS nasional dan daerah yang belum terbangun dengan optimal. Sebagai akibatnya, OMS kecil yang hanya beroperasi di satu atau dua Kota/Kabupaten hanya dapat mengakses sebagian kecil dana, pembangunan kapasitas dan kesempatan berjejaring.

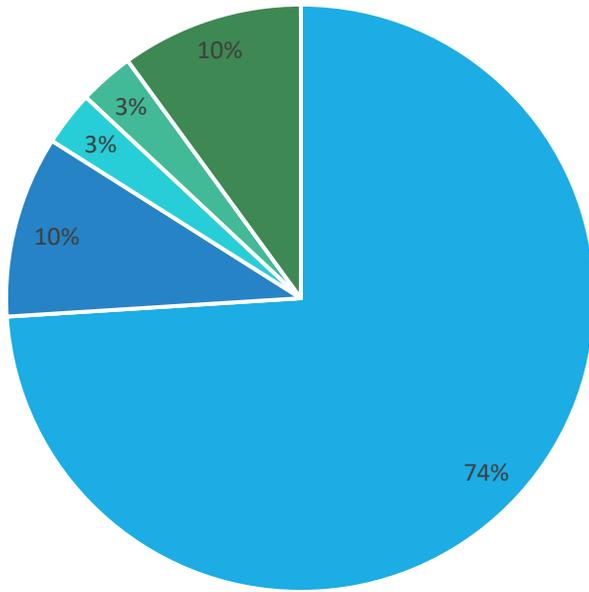
Belum terbangunnya suatu struktur dukungan bagi masyarakat sipil, yang dapat membantu OMS mengembangkan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk mengakses dana dari sumber non-tradisional.

Sumber dana alternatif belum terbangun dengan baik. Belum tercipta suatu budaya kelembagaan atau kedermawanan strategis yang dapat mendukung sektor OMS di Indonesia.

Proses demokratisasi dan desentralisasi yang terjadi pasca Orde Baru menuntut hubungan kerja sama yang lebih kompleks. Ada begitu banyak kesempatan kerja sama dengan pemerintah dalam hal membentuk kebijakan dan menjalankan program; namun tidak semua OMS memanfaatkan kesempatan tersebut.

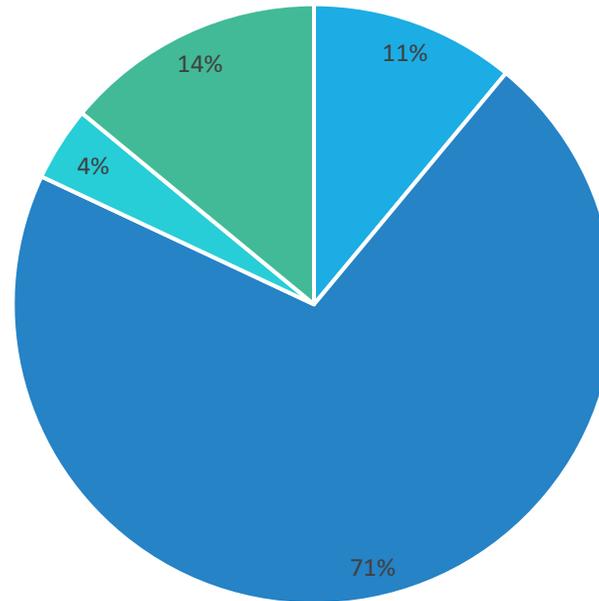
PEMETAAN SUMBER KEUANGAN OMS

Sumber Keuangan OMS Kabupaten/Kota



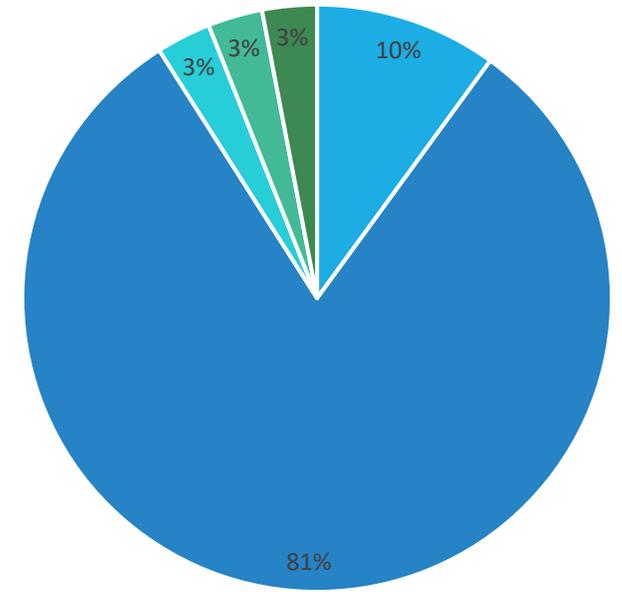
■ Swadaya ■ NGO Internasional
■ Pemerintah ■ Swasta
■ Lainnya

Sumber Keuangan OMS Provinsi



■ Swadaya ■ NGO Internasional ■ Pemerintah ■ Lainnya

Sumber Keuangan OMS Nasional



■ Swadaya ■ NGO Internasional
■ Pemerintah ■ Swasta
■ Lainnya

TANTANGAN PENDANAAN OMS DI MASA PANDEMI

Studi di masa pandemi yang dilaksanakan oleh INFID (2020) menunjukkan bahwa 72% LSM terkena dampak negatif pada sektor keuangan akibat pandemi COVID-19. Di mana 23% berada pada fase kritis, yang memungkinkan mereka tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama dikarenakan ketergantungan pendanaan terhadap pihak eksternal dan biaya tambahan akibat pandemi. Beranjak dari berbagai pengamatan tersebut, secara garis besar dapat diringkas beberapa tantangan mendesak yang dihadapi pendanaan LSM, di antaranya dijabarkan sebagai berikut:

Krisis likuiditas yang akut;

Tekanan untuk mengurangi kapasitas operasional dengan cepat agar dapat mempertahankan respon;

Beban risiko keuangan dan operasional yang tidak proporsional ditanggung oleh LSM dan mitra-mitranya;

Prospek kemunduran ekonomi yang memengaruhi kemampuan LSM dalam menutupi biaya yang diperkirakan tidak mungkin ditalangi oleh bantuan hibah pembangunan maupun donasi individu saat ini dan di masa depan.

PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP PROBLEMATIKA OMS



Dr. Amalinda Savirani Akademisi UGM

Perubahan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah menyebabkan banyak sumber pendanaan eksternal tidak bisa lagi masuk ke Indonesia.



Meuthia Ganie Rochman, Ph.D. Akademisi UI

Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan organisasi dan struktur ekonomi pada OMS. Hal tersebut membuat banyak OMS mengalami disrupsi eksistensial.

Problematika pada definisi OMS di Indonesia yang menganut nomenklatur Ormas. *Civil Society* itu harus konstitusional, transparan, akuntabel, partisipatif, representatif, dan ada rotasi kekuasaan.

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Swakelola Tipe 3, antara lain kendala administratif bagi OMS dan keraguan Pemerintah untuk menggunakan mekanisme swakelola tipe 3.

CATATAN RPERPRES PENDANAAN OMS (DANA ABADI)

OMS memiliki peran penting dalam pembangunan dan demokratisasi, yaitu sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, dan kontrol sosial.

Dana abadi OMS merupakan salah satu upaya penguatan peran OMS sekaligus untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih berkualitas.

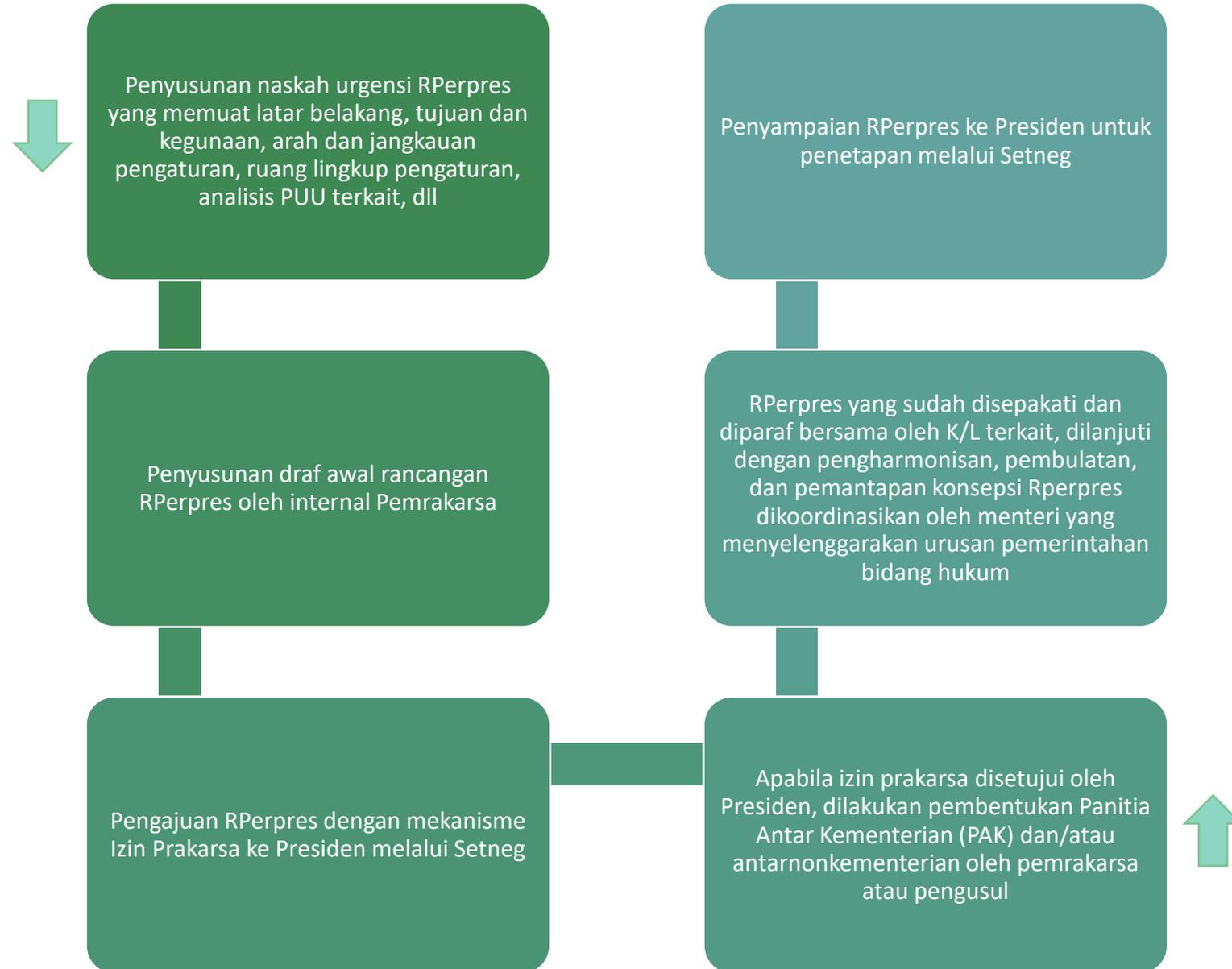
Deputi V KSP secara khusus menekankan pentingnya mewujudkan dana abadi OMS sebagai arahan Presiden Joko Widodo dalam peningkatan kualitas demokrasi. Kebijakan mengenai dana abadi OMS memerlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden tentang Dana Abadi OMS dan diupayakan dicantumkan dalam dokumen RKP 2023.

Apabila disetujui, pengelolaan keuangan dana abadi OMS diusulkan menggunakan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU), seperti halnya Dana Abadi Pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil (Khusus Unsur Pemerintah)
13 Desember 2021

(Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM)

ALUR PENYUSUNAN RPERPRES PENDANAAN OMS (DANA ABADI)





TERIMA KASIH